Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi

Hilda Ananda^{1*}, Siti Nur Afifah²

¹Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; Email: zahra@mhs.iiq.ac.id

²Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; Email: nasrullah@mhs.iiq.ac.id

**Correspondence*

Received: 23-06-2023, Revised: 07-07-2023, Reviewed: 10-08-2023, Published: 25-08-2023

Abstract—Dispute resolution carried out through the courts or what is often referred to as "litigation", namely a dispute resolution carried out through a court proceeding where the authority to regulate and decide is exercised by a judge. Dispute resolution outside of court (non-litigation) is an effort to bargain or compromise to obtain a mutually beneficial solution. The advantage of resolving disputes through litigation is that the court decision has definite legal force, is final, creates legal certainty in the position of the parties winning or losing (win and lose position), and can be forced to implement the decision if the losing party does not want to implement the contents of the court decision (execution). Meanwhile, the advantages of non-litigation are short time, no party knows (personal nature) and cooperation still occurs.

Keywords: Dispute Resolution, Litigation, Non-Litigation

Abstrak—Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan keunggulan secara non-litigasi yaitu Waktu Singkat, Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi) dan Kerjasama tetap terjadi.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Non-Litigasi

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku.

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah: alternatif penyelesaian sengketa apa saja yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketanya.

B. Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi

1. Penyelesaian Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu.² Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada *Regering Reglement* yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia.³

Pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.311

³ Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 73

persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.⁴ Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasanya ada menyertai substansi perkara tersebut

2. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu:

a. Konsultasi

Menurut Rahmad Rosyadi pengertian konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya.⁵ Selain itu konsultasi juga difahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Selain itu menurut Black's Law Dictionary bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Klien dalam hal ini bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri.

Walau demikian tidak menutup kemungkinan klien dapat menggunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Dalam hal ini konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.⁶

b. Negosiasi

Dalam Bussiness Law, Principles, Cases and Policy yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan

⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2017), h. 18

⁵ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.124

⁶ Ahamdi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h.70

membuat persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.⁷ Menurut Joni Emerson negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan Bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif, menurutnya para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara kooperatif dan saling terbuka.⁸

Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan dalam melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendapaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.⁹ Adapun tahapan negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap yaitu:¹⁰

- 1) Tahapan persiapan
 - a) Persiapan sebagai kunci keberhasilan
 - b) Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian.
 - c) Usahakan berfikri dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan anda
 - d) Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokan atau menyerang pihak lawan.
 - e) Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan
 - f) Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama
 - g) Menyiapkan agenda, logistic, ruangan dan konsumsi
 - h) Menyiapkan tim dan strategi
- 2) Tahapan Orientasi dan Mengatur Posisi
 - a) Bertukar Informasi
 - b) Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
 - c) Mengajukan tawaran awal
- 3) Tahapan Pemberi Konsesi atau Tawar Menawa
 - a) Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya.
 - b) Dapat menawarkan konsesi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalannya.
 - c) Mencoba memahami pemikiran pihak lawan.
 - d) Mengidentifikasi kebutuhan Bersama
 - e) Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian.
- 4) Tahapan Penutup
 - a) Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria objektif

⁷ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Teras 2011), h. 156-157

⁸ Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001). h.44

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (), h. 443

¹⁰ Gunawan Wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56

- b) Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada komitmen

c. Mediasi

Pengertian mediasi menurut pasal 1 butir tujuh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ada beberapa alasan mengapa mediasi penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia antara lain yaitu¹¹:

- 1) Faktor Ekonomis, di mana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- 2) Factor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

Menurut Rajagukguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila memiliki hal-hal sebagai berikut¹² :

- 1) Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka
- 2) Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat.
- 3) Litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Ditambah lagi belum tentu menang.
- 4) Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan menyampaikan kepentingan masing-masing.
- 5) Waktu adalah inti dari penyelesaian
- 6) Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak mengajukan gugatan atau klaim sembarang, dan pihak lainnya merasa ia akan menang melalui litigasi. Mediasi akan gagal bila salah satu menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beritikad buruk.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.¹³ Menurut Munir Fuady konsiliasi mirip dengan mediasi yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁴

Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja konsiliator lebih aktif dibanding mediator di antaranya yaitu:

¹¹Alasan Keberadaan BAMI, www.badanmediasi.com, diakses pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 13:42 WIB.

¹² Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas), h. 24

¹³ Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 376

¹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

- 1) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
- 2) Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
- 5) Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Proses konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi sebagaimana yang berlaku dalam mediasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Goospaster yaitu sebagai berikut¹⁵:

- 1) Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding
- 2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
- 3) Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
- 4) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk penyelesaian
- 5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
- 6) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan.
- 7) Mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
- 8) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.

e. Pendapat atau Penilaian Ahli

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas Lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁶

C. Perbedaan dan Keunggulan Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi

1. Perbedaan Litigasi dan Non-Litigasi

a. Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan persentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan Kerjasama

¹⁵ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.17

¹⁶ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengapus Ekonomi Islam Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Teras 2011), h. 180-181

untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Pada umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

b. Non-Litigasi

Jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan "penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan". Kedua dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif penyelesaian perkara (alternatif Dispute Resolution) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitrase.¹⁷

2. Keunggulan Litigasi dan Non-Litigasi

a. Keunggulan Litigasi

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Menurut sudikno mertokusumo bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial dan kekuatan untuk dilaksanakan. Adapun penjelasannya terkait dengan tiga macam kekuatan tersebut adalah ¹⁸:

1) Kekuatan Mengikat

¹⁷ Mohamad Jusuf Husain Isa, dkk, *Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution*, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol.2 No 3, 2022, diakses pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 pukul 11:18 WIB.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), cet ke-1, h. 177-182

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan Kembali).

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negative. Mengikat dalam arti positif yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negative yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai perkara yang sama.

2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, memiliki arti yaitu bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan mendapatkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Ketentuan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudahan direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

b. Keunggulan Non-Litigasi

- 1) Waktu Singkat
- 2) Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi)
- 3) Kerjasama tetap terjadi¹⁹

¹⁹ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h.31-32

D. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.
2. Litigasi adalah persiapan dan persentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan Kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Sedangkan jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.
Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan keunggulan secara non-litigasi yaitu Waktu Singkat, Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi) dan Kerjasama tetap terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasan Keberadaan BAMI, www.badanmediasi.com, diakses pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 13:42 WIB.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Emerson, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2001
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995
- Hak, Nuril. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengapus Ekonomi Islam Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011

- Hak, Nuril. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Teras. 2011
- Hasan, Ahamdi. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin. Antasari Press. 2009
- Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014
- Ka'bah, Rif'al. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Yarsi. 1999
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993
- Mohamad Jusuf Husain Isa, dkk, *Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution*, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol.2 No 3, 2022, diakses pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 pukul 11:18 WIB.
- Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. 2009
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002
- Rajagukguk, Erman. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*. Depok. Prenadamedia. 2017
- Wijaya, Gunawan. *Alternative Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002